



MENTERI KEUANGAN RI

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
  2. Jaksa Agung RI
  3. Kepala Kepolisian RI
  4. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen
  5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara  
di JAKARTA

SURAT EDARAN  
Nomor: SE-171/MK.02/2005

TENTANG

PAGU SEMENTARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2006

Dalam rangka Penyusunan RAPBN Tahun 2006, Pemerintah akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2006 pada tanggal 16 Agustus 2005 kepada DPR-RI. Untuk keperluan tersebut diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2006 antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI tanggal 7 Juli 2005 telah menetapkan Pagu Sementara Anggaran Belanja tahun 2006 bagi Kementerian Negara/Lembaga.
2. Rincian Pagu Sementara Anggaran Belanja tahun 2006 menurut Program untuk Kementerian/Lembaga Saudara adalah sebagaimana terlampir (Lampiran I).
3. Dalam pagu sementara seperti tersebut pada butir 2 sudah termasuk:
  - a. Dana untuk membiayai seluruh belanja penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan menjadi program prioritas dan program penunjang dalam tahun anggaran 2006;
  - b. Dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN);
  - c. Dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - d. Dana yang dialokasikan untuk melanjutkan program percepatan pemulihan Provinsi Maluku dan Maluku Utara pasca konflik dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2003. Pengalokasian dana di dalam RKA-KL 2006 agar mengacu kepada Rencana Aksi Inpres Nomor 6 tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik tahun 2006 yang telah disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Lampiran II);
4. Berdasarkan Pagu Sementara Anggaran Belanja tahun 2006 tersebut, diminta agar Saudara menyusun RKA-KL 2006 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.02/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL 2006 yang memuat:
  - a. Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL 2006;
  - b. Pedoman Penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2007-2008;
  - c. Petunjuk Teknis Pengisian Aplikasi RKA-KL 2006.
5. Dalam menyusun RKA-KL 2006 hendaknya Kementerian Negara/Lembaga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjamin tersedianya Belanja Pegawai yang dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan riil selama 12 bulan agar tidak terjadi kekurangan dana sampai dengan akhir tahun anggaran 2006;
  - b. Menjamin tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan aset-aset yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga serta keperluan pembayaran langganan daya dan jasa;
  - c. Dana untuk Rupiah Pendamping maupun Non Pendamping (*Local Cost*) untuk PHLN 2006;
  - d. Dana untuk membiayai kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multi years project*) yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan
  - e. Kurs rupiah terhadap dolar AS untuk belanja yang dananya bersumber dari PHLN menggunakan asumsi pembicaraan pendahuluan RAPBN 2006 sebesar Rp.9.200,-/ 1 US\$;
  - f. Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku;
  - g. Dalam mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan agar mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
  - h. Dalam rangka pelaksanaan Azas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diharapkan agar pelaksanaan kegiatan Kementerian/Lembaga didaerah memanfaatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - i. Untuk mendukung percepatan pencapaian target keluaran tiap-tiap kegiatan/subkegiatan maka unit struktural eselon II tingkat pusat dapat ditetapkan sebagai Satuan Kerja sepanjang diperlukan dan diusulkan oleh unit eselon I yang bersangkutan.
6. Proses penyelesaian RKA-KL agar berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
  7. Sebagai bukti telah dilakukan pembahasan dengan komisi terkait DPR-RI, maka Kementerian/Lembaga agar memintakan tanda tangan/paraf dari Pimpinan Komisi yang bersangkutan pada lembar yang telah disediakan dalam RKA-KL;
  8. RKA-KL tersebut pada butir 7 disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2005;
  9. Memenuhi amanat PP No. 21 tahun 2004 pasal 10 ayat (5) diminta perhatian hal-hal sebagai berikut :
    - a. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL seperti tersebut pada butir 7 dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian /Lembaga tahun 2006 dan satuan biaya yang telah ditetapkan;
    - b. Penelaahan tersebut butir a secara menyeluruh harus sudah diselesaikan pada akhir bulan Juli 2005 agar Nota Keuangan dan RAPBN 2006 yang antara lain memuat Himpunan RKA-KL 2006 dapat diselesaikan dan disampaikan oleh Presiden kepada DPR-RI pada tanggal 16 Agustus 2006.

Demikian disampaikan, dan atas kerja sama yang baik dalam penyelesaian RKA-KL 2006 sesuai jadwal yang telah ditetapkan diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 11 Juli 2005  
 Menteri Keuangan,

Jusuf Anwar

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

## RINCIAN PAGU SEMENTARA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2006

(Dalam ribu rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	RINCIAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2006 (Dalam ribuan rupiah)								JUMLAH MENGIKAT DAN PNBP	JUMLAH TOTAL
			TIDAK MENGIKAT				MENGIKAT					
			RUPIAH MURNI	P H L N		JUMLAH	PEGAWAI	BARANG	JUMLAH	PNBP		
PLN	HIBAH											
1	01	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	51.017.300	0	0	51.017.300	9.226.194	65.081.400	74.307.594	0	74.307.594	125.324.894
2	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	210.000.000	0	1.441.500	211.441.500	216.163.899	679.262.600	895.426.499	0	895.426.499	1.106.867.999
3	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	148.377.800	20.880.000	0	169.257.800	110.421.200	145.374.100	255.795.300	0	255.795.300	425.053.100
4	05	MAHKAMAH AGUNG	380.000.000	0	0	380.000.000	746.835.058	267.109.925	1.013.944.983	6.723.765	1.020.668.748	1.400.668.748
5	06	KEJAKSAAN AGUNG	325.000.000	50.848.000	0	375.848.000	380.164.500	375.018.629	755.183.129	0	755.183.129	1.131.031.129
6	07	SEKRETARIAT NEGARA	185.000.000	54.000.000	0	239.000.000	61.409.326	149.997.700	211.407.026	0	211.407.026	450.407.026
7	07	SEKRETARIAT KABINET	5.000.000	0	0	5.000.000	0	9.910.700	9.910.700	0	9.910.700	14.910.700
8	07	SEKRETARIAT PRESIDEN	45.000.000	0	0	45.000.000	18.771.200	394.205.500	412.976.700	0	412.976.700	457.976.700
9	07	SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN	5.000.000	0	0	5.000.000	0	9.632.831	9.632.831	0	9.632.831	14.632.831
10	07	PASUKAN PENGAMAN PRESIDEN	5.000.000	0	0	5.000.000	0	16.905.700	16.905.700	0	16.905.700	21.905.700
11	08	WAKIL PRESIDEN	39.000.000	0	0	39.000.000	4.175.000	79.491.400	83.666.400	0	83.666.400	122.666.400
12	08	BADAN KOORDINASI NASIONAL	38.078.400	0	0	38.078.400	1.500.000	3.500.000	5.000.000	0	5.000.000	43.078.400
13	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	420.000.000	147.000.000	0	567.000.000	173.864.400	165.990.600	339.855.000	0	339.855.000	906.855.000
14	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	95.000.000	0	0	95.000.000	2.130.457.747	1.796.984.369	3.927.442.116	103.411.945	4.030.854.061	4.125.854.061
15	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	4.510.000.000	4.450.518.000	0	8.960.518.000	9.529.043.472	5.151.327.953	14.680.371.425	0	14.680.371.425	23.640.889.425
16	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	610.000.000	0	0	610.000.000	936.484.079	752.925.378	1.689.409.457	260.005.500	1.949.414.957	2.559.414.957
17	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	1.645.000.000	673.613.193	16.193.407	2.334.806.600	1.207.360.539	1.971.402.218	3.178.762.757	111.996.968	3.290.759.725	5.625.566.325
18	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	3.185.000.000	581.695.100	11.538.600	3.778.233.700	400.289.400	173.879.789	574.169.189	23.758.211	597.927.400	4.376.161.100
19	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	538.738.500	4.205.000	0	542.943.500	149.150.673	67.028.680	216.179.353	38.842.107	255.021.460	797.964.960
20	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	1.840.000.000	1.913.200.000	0	3.753.200.000	151.221.128	263.533.093	414.754.221	608.683.208	1.023.437.429	4.776.637.429
21	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	2.409.682.000	2.773.415.000	0	5.183.097.000	499.624.444	497.449.100	997.073.544	160.136.866	1.157.210.410	6.340.307.410
22	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	23.405.219.100	1.117.183.110	2.116.890	24.524.519.100	3.462.679.357	1.224.674.996	4.687.354.353	2.250.503.720	6.937.858.073	31.462.377.173
23	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	8.409.627.400	947.929.089	515.370.811	9.872.927.300	1.245.303.679	139.839.215	1.385.142.894	192.322.451	1.577.465.345	11.450.392.645
24	25	DEPARTEMEN AGAMA	2.845.800.000	520.000.000	0	3.365.800.000	4.413.980.748	348.579.916	4.762.560.664	183.946.110	4.946.506.774	8.312.306.774
25	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.175.000.000	0	0	1.175.000.000	188.168.490	291.945.786	480.114.276	227.186.781	707.301.057	1.882.301.057

(Dalam ribu rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	RINCIAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2006 (Dalam ribuan rupiah)									JUMLAH TOTAL
			RUPIAH MURNI	TIDAK MENGIKAT		JUMLAH	MENGIKAT			PNBP	JUMLAH MENGIKAT DAN PNBP	
				P H L N			PEGAWAI	BARANG	JUMLAH			
				P L N	HIBAH							
26	27	DEPARTEMEN SOSIAL	1.781.113.700	0	0	1.781.113.700	86.224.047	166.761.635	252.985.682	1.621.505	254.607.187	2.035.720.887
27	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	265.000.000	0	13.000.000	278.000.000	283.316.900	304.974.516	588.291.416	0	588.291.416	866.291.416
28	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.540.000.000	352.762.000	0	1.892.762.000	116.339.000	134.984.870	251.323.870	8.405.830	259.729.700	2.152.491.700
29	33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	9.100.000.000	3.557.048.800	0	12.657.048.800	283.844.683	214.667.439	498.512.122	13.644.561	512.156.683	13.169.205.483
30	34	MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	52.000.000	0	0	52.000.000	4.316.986	10.643.978	14.960.964	0	14.960.964	66.960.964
31	35	MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	27.000.000	42.390.000	0	69.390.000	3.100.000	8.900.000	12.000.000	0	12.000.000	81.390.000
32	36	MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	32.000.000	5.800.000	0	37.800.000	3.250.000	9.553.100	12.803.100	0	12.803.100	50.603.100
33	40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	316.000.000	0	0	316.000.000	123.454.000	101.196.351	224.650.351	11.331.649	235.982.000	551.982.000
34	41	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	35.900.000	0	0	35.900.000	13.513.600	11.553.600	25.067.200	0	25.067.200	60.967.200
35	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	145.000.000	0	0	145.000.000	4.667.400	30.332.600	35.000.000	0	35.000.000	180.000.000
36	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	110.000.000	0	125.000.000	235.000.000	16.131.179	20.178.662	36.309.841	9.972.000	46.281.841	281.281.841
37	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	755.000.000	0	0	755.000.000	36.292.000	25.924.500	62.216.500	0	62.216.500	817.216.500
38	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	62.500.000	0	8.500.000	71.000.000	4.064.143	21.787.373	25.851.516	0	25.851.516	96.851.516
39	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	42.000.000	0	7.500.000	49.500.000	8.448.455	12.362.094	20.810.549	0	20.810.549	70.310.549
40	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	350.000.000	0	0	350.000.000	26.460.621	487.472.963	513.933.584	0	513.933.584	863.933.584
41	51	LEMBAGA SANDI NEGARA	350.000.000	0	0	350.000.000	11.264.100	12.074.700	23.338.800	0	23.338.800	373.338.800
42	52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	15.000.000	0	0	15.000.000	2.015.800	4.400.000	6.415.800	0	6.415.800	21.415.800
43	54	BADAN PUSAT STATISTIK	120.500.000	0	0	120.500.000	228.952.321	58.187.700	287.140.021	0	287.140.021	407.640.021
44	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS	120.000.000	39.875.000	0	159.875.000	29.376.552	12.592.100	41.968.652	0	41.968.652	201.843.652
45	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	130.000.000	355.043.100	0	485.043.100	401.051.187	102.893.843	503.945.030	369.047.439	872.992.469	1.358.035.569

(Dalam ribu rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	RINCIAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2006 (Dalam ribuan rupiah)										JUMLAH TOTAL
			RUPIAH MURNI	TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT			PNBP	JUMLAH MENGIKAT DAN PNBP		
				P H L N		JUMLAH	PEGAWAI	BARANG	JUMLAH				
				P L N	HIBAH								
46	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL	61.000.000	0	0	61.000.000	13.525.000	11.887.100	25.412.100	150.954	25.563.054	86.563.054	
47	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	189.000.000	0	0	189.000.000	75.353.612	99.398.893	174.752.505	916.336.331	1.091.088.836	1.280.088.836	
48	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.700.000.000	1.320.000.000	0	3.020.000.000	7.200.785.800	2.051.571.627	9.252.357.427	891.068.083	10.143.425.510	13.163.425.510	
49	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	137.000.000	11.600.000	0	148.600.000	65.772.953	14.435.962	80.208.915	19.780.000	99.988.915	248.588.915	
50	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	20.000.000	0	0	20.000.000	8.100.596	20.377.404	28.478.000	0	28.478.000	48.478.000	
51	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	186.000.000	0	0	186.000.000	10.805.504	12.028.625	22.834.129	0	22.834.129	208.834.129	
52	66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	165.000.000	0	0	165.000.000	13.555.070	18.197.000	31.752.070	0	31.752.070	196.752.070	
53	67	MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	79.500.000	348.551.000	0	428.051.000	2.834.400	15.338.900	18.173.300	0	18.173.300	446.224.300	
54	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	403.000.000	72.753.500	6.322.500	482.076.000	90.262.500	40.292.500	130.555.000	0	130.555.000	612.631.000	
55	74	KOMISI HAK ASASI MANUSIA	10.000.000	0	0	10.000.000	9.929.000	6.205.000	16.134.000	0	16.134.000	26.134.000	
56	75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	80.000.000	0	0	80.000.000	61.088.000	57.286.000	118.374.000	0	118.374.000	198.374.000	
57	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	10.000.000	0	0	10.000.000	179.057.122	13.276.533	192.333.655	0	192.333.655	202.333.655	
58	77	MAHKAMAH KONSTITUSI	60.000.000	0	0	60.000.000	4.965.000	83.786.800	88.751.800	0	88.751.800	148.751.800	
59	78	PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN	0	0	0	0	15.630.086	22.106.146	37.736.232	0	37.736.232	37.736.232	
60	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	188.000.000	75.314.000	0	263.314.000	93.701.927	40.036.948	133.738.875	15.037.254	148.776.129	412.090.129	
61	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	67.000.000	0	0	67.000.000	102.351.834	47.732.903	150.084.737	2.834.063	152.918.800	219.918.800	
62	81	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	124.000.000	0	0	124.000.000	89.750.500	41.821.808	131.572.308	53.216.788	184.789.096	308.789.096	
63	82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	103.500.000	0	0	103.500.000	23.078.343	16.478.971	39.557.314	3.245.559	42.802.873	146.302.873	
64	83	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	105.000.000	5.000.000	0	110.000.000	15.000.000	5.343.200	20.343.200	8.033.850	28.377.050	138.377.050	
65	84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	18.000.000	0	0	18.000.000	3.013.810	8.478.490	11.492.300	2.820.000	14.312.300	32.312.300	
66	85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	24.500.000	0	0	24.500.000	5.529.719	11.231.820	16.761.539	434.702	17.196.241	41.696.241	
67	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	52.000.000	0	0	52.000.000	17.149.256	51.165.819	68.315.075	9.282.225	77.597.300	129.597.300	

(Dalam ribu rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	RINCIAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2006 (Dalam ribuan rupiah)									JUMLAH TOTAL
			RUPIAH MURNI	TIDAK MENGIKAT		JUMLAH	MENGIKAT			PNBP	JUMLAH MENGIKAT DAN PNBP	
				PLN	HIBAH		PEGAWAI	BARANG	JUMLAH			
68	87	ARSIP NASIONAL	53.500.000	0	0	53.500.000	12.053.000	10.605.300	22.658.300	0	22.658.300	76.158.300
69	88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	90.000.000	0	0	90.000.000	75.928.619	35.730.500	111.659.119	0	111.659.119	201.659.119
70	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN	125.000.000	4.300.000	0	129.300.000	158.321.074	137.238.381	295.559.455	0	295.559.455	424.859.455
71	90	PERDAGANGAN	526.261.000	0	6.125.000	532.386.000	94.932.501	166.761.635	261.694.136	12.808.575	274.502.711	806.888.711
72	91	PERUMAHAN RAKYAT	250.000.000	0	0	250.000.000	31.156.936	32.287.764	63.444.700	0	63.444.700	313.444.700
73	92	PEMUDA DAN OLAH RAGA	250.000.000	0	0	250.000.000	6.524.000	194.490.000	201.014.000	0	201.014.000	451.014.000
74	93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	0	0	0	0	41.400.000	158.600.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000
75	95	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	53.982.700	0	0	53.982.700	55.305.400	54.752.400	110.057.800	0	110.057.800	164.040.500
<b>JUMLAH</b>			<b>73.005.797.900</b>	<b>19.444.923.892</b>	<b>713.108.708</b>	<b>93.163.830.500</b>	<b>36.299.239.069</b>	<b>20.271.438.031</b>	<b>56.570.677.100</b>	<b>6.516.589.000</b>	<b>63.087.266.100</b>	<b>156.251.096.599</b>

**REKAPITULASI RENCANA AKSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TA 2006  
 DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 6 TAHUN 2003  
 TENTANG PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU DAN MALUKU UTARA PASCA KONFLIK**

(dalam Ribuan Rupiah)

No. Urut	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Alokasi Dana		Jumlah
			Maluku	Maluku Utara	
1	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	8.915.000	19.200.000	28.115.000
2	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	22.053.000	4.800.000	26.853.000
3	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM	2.675.000	4.400.000	7.075.000
4	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	23.498.000	19.000.000	42.498.000
5	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	12.659.000	2.635.000	15.294.000
6	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	17.390.000	13.499.500	30.889.500
7	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	31.041.000	38.979.700	70.020.700
8	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	82.728.000	70.025.000	152.753.000
9	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	45.400.000	56.500.000	101.900.000
10	25	DEPARTEMEN AGAMA	26.248.000	31.121.000	57.369.000
11	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.135.000	19.250.000	29.385.000
12	27	DEPARTEMEN SOSIAL	36.375.000	41.000.000	77.375.000
13	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	44.650.000	34.250.000	78.900.000
14	33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	94.490.000	47.306.000	141.796.000
15	40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	17.600.000	19.000.000	36.600.000
16	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	800.000	1.500.000	2.300.000
17	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	31.295.000	15.000.000	46.295.000
18	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	6.020.000	1.750.000	7.770.000
19	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.335.000	9.800.000	23.135.000
20	60	KEPOLISIAN RI	14.431.000	5.700.000	20.131.000
21	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.250.000	2.500.000	3.750.000
22	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	3.700.000	3.500.000	7.200.000
23	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	9.200.000	4.114.800	13.314.800
<b>JUMLAH</b>			<b>555.888.000</b>	<b>464.831.000</b>	<b>1.020.719.000</b>

A.N. MENTERI KEUANGAN  
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

ACHMAD ROCHJADI  
 NIP 060047192

